

# Penguasaan Konsep Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk Meningkatkan Sikap Nasionalisme Siswa

Muhammad Mona Adha<sup>1</sup>

dan

Febra Anjar Kesuma

---

## Abstract

*The study was conducted to determine and explain the role of Mastery Learning Concepts to Improve Civic Education student attitudes Nationalism. In this study the authors used descriptive research method with a population sample of 923 students and 46 students. The independent variable in this study is the mastery learning concept of civic education while the dependent variable is the attitude of students of nationalism.*

**Keywords:** *concept learning, civic education, and nationalism*

*Penelitian ini diperuntukkan untuk menentukan dan menjelaskan peran dari Penguasaan Konsep Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk meningkatkan sikap Nasionalisme Siswa. Dalam pembahasan ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan populasi sampel 923 pelajar dan 46 pelajar. Variabel mandiri dari pembahasan ini adalah konsep belajar penguasaan dari Pendidikan Kewarganegaraan sementara variabel dependen yaitu sikap dari murid dari nasionalisme.*

**Kata Kunci:** *konsep pembelajaran PKn dan nasionalisme*

---

## PENDAHULUAN

Sekolah sebagai salah satu lembaga yang membantu pemerintah dalam menyiapkan generasi penerus bangsa bertanggung jawab dalam menangani masalah pendidikan melalui usaha membimbing, mendidik dan melatih siswa, sehingga siswa tersebut memiliki kepribadian yang baik, berakhlak mulia, berjiwa kreatif, mandiri dan menjadi manusia yang bertanggung jawab. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi :

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal bertugas untuk mengembangkan potensi, kemampuan, bakat dan minat siswa yang memungkinkan mereka menjadi manusia-manusia yang dapat berkembang dengan baik, bahagia dan bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini sekolah harus melaksanakan banyak hal, misalnya: program pendidikan hendaknya ditunjang oleh

---

<sup>1</sup> Dosen FKIP Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Lampung. Alamat: Jalan Pangrango II No. 186 Perumnas Wayhalim Bandar Lampung 35141. Telp 0721-784020 atau HP 085769877747, e-mail: adha\_1979@yahoo.com

kegiatan–kegiatan yang sejalan antara pimpinan sekolah, guru bidang studi, petugas Bimbingan dan Konseling ataupun semua karyawan sekolah bahkan orang tua siswa, masyarakat untuk mengikuti perkembangan pembangunan bangsa khususnya dibidang pendidikan.

Guru sebagai komponen manusiawi dalam proses belajar mengajar, ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial dalam bidang pembangunan. Dalam rangka ini guru tidak semata-mata sebagai pengajar “*transfer of knowledge*” tetapi juga sebagai pendidik “*transfer of value*”. Selain berperan sebagai pengajar dan pendidik, guru juga berperan sebagai pembimbing yang memberikan pengarahan cara menuntun siswanya dalam belajar.

Berkaitan dengan uraian di atas, guru memiliki peranan yang unik dan sangat kompleks di dalam proses belajar mengajar untuk mengantarkan siswanya pada taraf yang dicita-citakan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pada setiap guru terletak tanggung jawab untuk membawa para siswanya pada suatu kedewasaan atau taraf kematangan tertentu. Oleh karena itu, setiap rencana kegiatan guru hanya bertujuan semata-mata demi kepentingan anak didik sesuai dengan profesi dan tanggung jawabnya.

Pembelajaran merupakan bagian atau elemen yang memiliki peran yang sangat dominan untuk mewujudkan kualitas baik proses maupun lulusan (*output*) pendidikan. Hal ini sangat tergantung pada guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar di kelas. Hal ini sama dengan apa yang dikemukakan oleh Muchith (2008: 1) di bawah ini:

Artinya pembelajaran sangat tergantung dari kemampuan guru dalam melaksanakan atau mengemas proses pembelajaran. Pembelajaran yang dilaksanakan secara baik dan tepat akan memberikan kontribusi sangat dominan bagi siswa, sebaliknya pembelajaran yang dilaksanakan dengan cara yang tidak baik akan menyebabkan potensi siswa sulit dikembangkan atau diberdayakan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa, posisi guru memegang peranan penting untuk mengolah isi materi yang akan disampaikan kepada siswa di kelas. Semakin berkualitas, baik itu dari segi isi materi dan strategi yang digunakan oleh guru, maka akan semakin baik hasilnya bagi siswa.

## KAJIAN PUSTAKA

### Pengertian Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusia, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Proses pembelajaran bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa secara optimal agar siswa mencapai tujuan yang diharapkan. Banyak faktor yang menunjang proses pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Guru sebagai orang yang mentransfer ilmu pengetahuan, sikap dan perilakunya terhadap anak didik atau disebut juga mengajar. Mengajar adalah membimbing kegiatan siswa dalam belajar, seperti yang dikemukakan Sudjana (2006: 7), mengajar adalah mengatur dan mengkordinasikan lingkungan yang ada disekitar siswa sehingga dapat mendorong dan menumbuhkan siswa melakukan kegiatan belajar.

Apabila telah terjadi interaksi antara guru dan siswa dalam proses belajar mengajar berarti telah terjadi komunikasi untuk keberhasilan proses belajar mengajar. Guru dalam proses mengajar harus mempunyai sikap atau perilaku guru *inquiry* yaitu guru belajar mempunyai kemampuan.

Komponen-komponen pembelajaran pada dasarnya diarahkan untuk mencapai tujuan. Melalui hal tersebut, segala usaha baik guru maupun siswa diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Melalui pembelajaran, maka guru dapat memahami tujuan dan arah pembelajaran itu sendiri, sehingga melalui tujuan yang jelas, bukan saja dapat menentukan

langkah-langkah pembelajaran dan pengembangan komponen yang lainnya, akan tetapi juga dapat dijadikan kriteria efektifitas proses pembelajaran.

Sugiartini dalam Adha (2010: 18) mengemukakan pembelajaran sebagai berikut:

Pembelajaran dapat diartikan sebagai upaya yang sistemik dan disengaja untuk menciptakan kondisi-kondisi agar terjadi kegiatan belajar dan membelajarkan. Dalam kegiatan itu terjadi interaksi antara kedua belah pihak, yaitu peserta didik (warga belajar) yang melakukan kegiatan belajar, dengan pendidik (sumber belajar) yang melakukan kegiatan membelajarkan.

Dapat dikatakan bahwa pembelajaran merupakan proses interaksi belajar mengajar mengenai kedua belah pihak, yaitu antara siswa dan guru yang berguna merubah, membentuk, dan diharapkan nantinya memiliki pola perilaku yang lebih baik ke depan. Pembelajaran juga merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan yang merupakan keberhasilan guru dan siswa.

Pendidikan Kewarganegaraan bersifat universal, yang berkaitan antara warga negara, individu dengan “*government*”, hak dan kewajiban sebagai warga negara dari sebuah negara, hukum, demokrasi, dan partisipasi, kesiapan warga negara sebagai bagian dari warga dunia. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai “*citizenship education*” secara substantif dan paedagogis didesain untuk mengembangkan warga negara yang cerdas terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berfikir dan bertindak sesuai dengan amanat pancasila dan UUD 1945. Maka setelah menganalisis dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan terdiri dari dua istilah yaitu “*Civics Education*” dan “*Citizenship Education*” yang keduanya memiliki peranan masing-masing yang tetap saling berkaitan. “*Civics Education*” lebih pada suatu rancangan yang mempersiapkan warga negara muda, agar kelak

setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakat.

Harus diakui bahwa dalam melaksanakan tugas dan perannya sebagai guru *civics* tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan, melainkan guru *civics* dihadapkan pada sejumlah tantangan yang harus diketahui dan dipahami oleh para guru. Sebagaimana dikemukakan Somantri dalam Wuryan (2008: 46) bahwa guru *civics* dituntut harus memahami: (a) berbagai macam teknik mengajar, (b) hubungan bahan pelajaran *civics* dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, (c) lingkungan masyarakat, agama, sains dan teknologi, dan (d) menganalisis karakter kata-kata ilmu sosial yang dapat ditafsirkan dari berbagai arti sudut pandang, terlebih latar belakang siswa yang berbeda-beda. Hal inilah yang oleh Samuelson disebut dengan tirani kata-kata (*tyranny of words*).

Wuryan (2008: 46) mengemukakan bahwa berkenaan dengan kesulitan mengajar *civics* adalah “*to steer between dull memorization of facts on one hand, and broad unsupported generalization on the other.*” Artinya, guru harus memadukan hapalan-hapalan dengan kehidupan yang sebenarnya dalam masyarakat. Dengan memadukan “*dull memorization*” dengan kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, maka para siswa dapat dilatih untuk berpikir, bersikap, dan bertindak demokratis di dalam kelas. Dengan kata lain, guru-guru harus melatih para siswa untuk berlatih menemukan konsensus dalam kehidupan masyarakat yang demokratis.

Tantangan lain yang dihadapi oleh guru *civics* menurut Somantri adalah kenyataan bahwa dalam pembelajaran ilmu-ilmu sosial, seperti pembelajaran *civics*, sejarah, geografi, ekonomi dan sebagainya seringkali mengundang rasa bosan dan menjenuhkan di kalangan siswa. Pertanyaannya adalah mengapa hal ini dapat terjadi? Hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya adalah (a) sifat ilmu sosial yang berbeda dengan ilmu alam atau eksakta, (b) bahasa dalam ilmu sosial dapat ditafsirkan dari berbagai sudut pandang (*point of view*) atau bersifat *multi interpretation*, lebih-lebih latar

belakang siswa yang berbeda, (c) buku teks ilmu sosial kurang menghubungkan teori dan kegiatan dasar manusia, dan (d) banyaknya isu-isu kontroversial dalam pelajaran ilmu-ilmu sosial.

Senada dengan hal tersebut di atas Mulyasana dalam Djahiri (2006: 166) mengemukakan bahwa

Pada kenyataannya, proses pembelajaran di Indonesia dititikberatkan pada pencapaian target kurikulum dengan menggunakan angka dan ijazah sebagai alat ukur keberhasilan. Kondisi ini telah memaksa terbentuknya iklim kelas yang hanya menetapkan nilai dan ijazah sebagai ukuran prestasi belajar. Dengan demikian tidaklah keliru apabila orientasi belajar para peserta didik akan melakukan “penghalalan” segala cara untuk memperoleh nilai dan ijazah. Merekayasa tugas pun akan dinyatakan sah demi nilai dan ijazah.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dalam praktiknya saat ini hendaknya lebih ditekankan pada pembentukan pada proses pemberdayaan warga negara, sehingga mereka mampu berperan sebagai *partner* pemerintah dalam menjalankan tugas kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan, diarahkan pada upaya pemberdayaan peserta didik menjadi manusia yang bermartabat, mampu bersaing dan unggul di jaman nya, serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan di lingkungannya. Dalam posisi inilah pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan diarahkan pada proses pembebasan peserta didik dari ketidakbenaran, ketidakadilan dan ketidakjujuran.

Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan upaya-upaya yang terencana dan terarah dalam suatu terutama dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang mampu menggali seluruh potensi individu/warga negara secara cerdas dan efektif demi terbentuknya masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Untuk itu, diperlukan pembaharuan/reformasi konsep dan paradigma

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dari yang hanya menekankan pada aspek kognitif menjadi penekanan pada pengembangan proses institusi-institusi negara dan kelengkapannya (Wahab, 1999).

Budimansyah (2008: 182) mengungkapkan bahwa perlu dilakukan revitalisasi Pendidikan Kewarganegaraan agar menjadi “subjek pembelajaran yang kuat (*powerful learning area*) yang secara kurikuler ditandai oleh pengalaman belajar secara kontekstual dengan ciri-ciri bermakna (*meaningful*), terintegrasi (*integrated*), berbasis nilai (*value based*), menantang (*challenging*) dan mengaktifkan (*activating*).

Djahiri dalam Adha (2010: 33) mengemukakan Target Harapan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yaitu, sebagai berikut :

- a. Secara pragmatik memuat bahan ajar yang khaffah/utuh (kognitif-afektif-psikomotor) berupa bekal pengetahuan untuk meleak politik dan hukum yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara NKRI yang demokratis sistem perwakilan konstitusional. Bahan ajar yang khaffah mutlak harus menampilkan politik hukum NKRI secara faktual-teoritik konseptual dan normatif berikut isi pesan (nilai-moral) serta aturan main dan tata cara pelaksanaannya. Dan sebagai bekal pengetahuan tidak mutlak semua hal disampaikan melainkan dipilih dan pilah berdasarkan tiga kriteria dasar yakni: tingkat esensinya, kegunaannya, dan kritis tidaknya.
- b. Secara prosedural target sasaran pembelajarannya adalah penyampaian bahan ajar pilihan-fungsional kearah membina, mengembangkan dan membentuk potensi diri anak didik secara khaffah serta kehidupan siswa dan lingkungannya (fisik, non fisik) sebagaimana diharapkan/keharusannya (6 sumber normatif di Indonesia) serta pelatihan pelakonan pemberdayaan hal tersebut dalam dunia nyata secara demokratis, humanis, dan fungsional.

Dengan demikian, target harapan dari pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk memberikan bekal kepada siswa dengan konsep/bahan ajar yang utuh agar mereka dapat mengerti tentang politik dan hukum serta pelaksanaannya. Dan dari hal tersebut siswa dapat mendapat nilai moral yang terkandung di dalamnya sebagai pegangan hidup di dalam masyarakat. Kemudian, target harapan kedua bahwa melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat membina, mengembangkan dan membentuk potensi yang ada pada diri siswa yang akan berguna bagi dirinya dan masyarakat nantinya.

### **Pengertian Nasionalisme**

Nasionalisme berasal dari kata *nation* (bangsa). Nasionalisme adalah suatu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara atas kesadaran keanggotaan/warga negara yang secara potensial bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsanya. Nasionalisme merupakan perpaduan dari rasa kebangsaan dan paham kebangsaan. Dengan semangat kebangsaan yang tinggi, kekhawatiran akan terjadinya ancaman terhadap keutuhan bangsa akan dapat dihindarkan.

Semangat kebangsaan akan mengalir rasa kesetiakawanan sosial, semangat rela berkorban, dan dapat menumbuhkan jiwa patriotisme. Rasa kesetiakawanan sosial akan mempertebal semangat kebangsaan suatu bangsa. Semangat rela berkorban adalah kesediaan untuk berkorban demi kepentingan yang besar atau demi negara dan bangsa telah mengantarkan bangsa Indonesia untuk merdeka. Bagi bangsa yang ingin maju dalam mencapai tujuannya, selain memiliki semangat rela berkorban, juga harus didukung dengan jiwa patriotik yang tinggi. Jiwa patriotik akan melekat pada diri seseorang, jika orang tersebut mengetahui untuk apa mereka berkorban.

Menurut Hertz dalam Listiyarti (1982: 32) dalam bukunya yang berjudul *Nationality in History and Politics* mengemukakan empat

unsur nasionalisme, yaitu :

- a. Hasrat untuk mencapai kesatuan
- b. Hasrat untuk mencapai kemerdekaan
- c. Hasrat untuk mencapai keaslian
- d. Hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa.

Stoddard dalam Yudohusodo (1995 : 69) “nasionalisme adalah suatu kepercayaan yang dimiliki oleh sebagian terbesar individu dimana mereka menyatakan rasa kebangsaan sebagai perasaan memiliki secara bersama di dalam suatu bangsa”, sedangkan menurut Kohn dalam Kusumohamijojo (1993 : 12) “nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan”.

### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Nazir (1985 : 63) menyatakan bahwa: “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang di teliti”. Penggunaan metode ini sangat tepat karena sasaran kajian penelitian ini adalah memaparkan suatu fakta, tentang Peranan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk meningkatkan sikap nasionalisme siswa di SMP N 1 Pagelaran Kabupaten Pringsewu Tahun Ajaran 2011/2012.

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa-siswi di SMP N 1 Pagelaran Kabupaten Pringsewu. Penetapan sampel mengambil enam kelas, dari tiap angkatan diambil masing-masing dua kelas sebagai sampel mengingat kelas tersebut memiliki karakteristik yang sama dengan kelas-kelas lain. Sampel dalam penelitian ini diambil sebanyak 20% sehingga sampelnya  $20\% \times 230 = 46$ . Dengan demikian jumlah keseluruhan sampel menjadi 46 orang.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan data hasil sebaran angket kepada 46 responden yang berisikan 20 soal

pertanyaan tes tentang Penguasaan Konsep Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan 15 pertanyaan angket tentang sikap nasionalisme siswa SMP N 1 Pagelaran Kabupaten Pringsewu Tahun Ajaran 2011/2012, maka penulis akan menjelaskan keadaan dan kondisi yang sebenarnya sesuai dengan data yang diperoleh mengenai Peranan Penguasaan Konsep Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Meningkatkan Sikap Nasionalisme siswa di SMP N 1 Pagelaran Kabupaten Pringsewu Tahun Ajaran 2011/2012

- a. Penguasaan Konsep Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Meningkatkan Sikap Nasionalisme siswa di SMP N 1 Pagelaran Kabupaten Pringsewu Tahun Ajaran 2011/2012 lebih dominan pada kategori paham hal ini dikarenakan siswa sudah memahami konsep Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan melalui indikator norma, hukum, peraturan, dan konstitusi negara. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengolahan data dengan menggunakan rumus interval diperoleh hasil bahwa sebanyak 24 responden atau 52% siswa mempunyai kategori paham dalam penguasaan Konsep Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan siswa di SMP N 1 Pagelaran Kabupaten Pringsewu Tahun Ajaran 2011/2012.
- b. Sikap Nasionalisme siswa di SMP N 1 Pagelaran Kabupaten Pringsewu Tahun Ajaran 2011/2012 lebih dominan pada kategori mendukung. Hal ini dikarenakan, siswa sudah mampu dalam mengamalkan aspek positif indikator-indikator sikap nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari seperti prinsip kebersamaan, prinsip persatuan dan kesatuan, prinsip demokrasi. Hal ini terlihat dari hasil pengolahan data dengan menggunakan rumus interval diperoleh hasil bahwa sebanyak 26 responden atau 56% siswa mempunyai kategori tinggi dalam sikap Nasionalisme siswa di SMP N 1 Pagelaran Kabupaten Pringsewu Tahun Ajaran 2011/2012

- c. Berdasarkan hasil analisis hipotesis yang dilakukan maka dapat dilihat bahwa peranan penguasaan konsep pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat meningkatkan sikap nasionalisme siswa di SMP N 1 Pagelaran Kabupaten Pringsewu Tahun Ajaran 2011/2012. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengolahan data dengan menggunakan rumus chi kuadrat dimana  $\chi^2$  hitung lebih besar dari  $\chi^2$  tabel ( $\chi^2$  hitung  $e''$   $\chi^2$  tabel ), yaitu 16,3  $e''$  9,49 pada taraf signifikan 5% (0,05) dan derajat kebebasan = 4, dengan koefisien kontingensi  $C = 0,51$  dan kontingensi maksimum  $C_{maks} = 0,816$ . Berdasarkan perhitungan tersebut maka koefisien kontingen  $C = 0,51$ , berada pada kategori sedang, hal ini menunjukkan bahwa penguasaan konsep pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berperan untuk meningkatkan sikap nasionalisme siswa di SMP N 1 Pagelaran Kabupaten Pringsewu Tahun Ajaran 2011/2012, artinya semakin tinggi penguasaan konsep pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan maka semakin mendukung pula sikap nasionalisme siswa. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah penguasaan konsep Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan maka semakin tidak mendukung pula sikap nasionalisme siswa.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dapat diketahui bahwa (1) Penguasaan konsep pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan siswa di SMP N 1 Pagelaran Kabupaten Pringsewu Tahun Ajaran 2011/2012 mempunyai kategori paham; (2) Sikap rasa nasionalisme siswa SMP N 1 Pagelaran Kabupaten Pringsewu Ajaran 2011/2012 adalah mendukung; (3) Berdasarkan hasil penelitian maka penguasaan konsep pendidikan kewarganegaraan berperan untuk meningkatkan sikap nasionalisme siswa di SMP N 1 Pagelaran Kabupaten Pringsewu Tahun Ajaran 2011/2012.

## Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat mengajukan saran sebagai berikut:

1. Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu untuk melakukan pembinaan-pembinaan terhadap guru Pendidikan Kewarganegaraan dengan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan dan workshop.
2. Kepada pihak sekolah untuk meningkatkan profesionalisme guru Pendidikan Kewarganegaraan khususnya kompetensi dan pedagogik.
3. Kepada guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan agar mengikuti pelatihan-pelatihan, penelitian, seminar ilmiah dan melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
4. Kepada para siswa generasi penerus bangsa agar lebih mencintai bangsanya seperti menggunakan produk dalam negeri, lebih memahami dan mengerti tentang budaya daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghani, Ruslan, 1995, *Nasionalisme Indonesia dalam Era Globalisasi*, Yayasan Widia Patria. Yogyakarta.
- Ahmadi, Abu, 2000, *Psikologi Sosial*, Rineka Cipta. Jakarta
- Adha, M,M, 2010, *Model Project Citizen untuk Meningkatkan Kecakapan Kewarganegaraan Pada Konsep Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat*. Tesis Magister pada Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Bandung: tidak diterbitkan
- Chotib dan Djazuli, 2007, *Kewarganegaraan Menuju Masyarakat Madani*, Ghalia Indonesia. Jakarta
- Kusumohamijojo, Budiono, 1993, *Pendidikan Wawasan Kebangsaan*, PT Grasindo. Jakarta
- Listyarti Retno. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Gelora Aksara Pratama. Jakarta
- Yudohusodo, Siswono. 1995. *Nasionalisme Indonesia Dalam Era Globalisasi*. Yayasan Widya Patrio. Yogyakarta.